

ABSTRAK

Penyelundupan manusia salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir. Ironis melihat kenyataan bahwa ternyata penyelundupan imigran paling banyak dilakukan melalui jalur laut dari wilayah Indonesia ke Australia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi dari di jadikan Indonesia sebagai negara transit dan bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyelundupan manusia ke Australia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menekankan pada penelaahan dokumen hukum dan bahan pustaka. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan kemudian dianalisis secara kualitatif, disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, serta disajikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasinya membahayakan nilai-nilai dasar yang selama ini terjaga dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia yang bisa mempengaruhi hubungan negara secara politik, dalam hal ini tiga hubungan politik terkait adalah negara Indonesia sebagai negara transit, Australia sebagai negara tujuan migran, dan negara asal serta persaingan dalam bisnis kemudian bisa melemahkan bagi usaha orang Indonesia karena orang asing yang diselundupkan sebagai buruh tentulebih murah dan pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya sebagai wujud aspek kesetiaan dan perlindungan. Implementasi dari hubungan hukum tersebut salah satunya adanya peraturan hukum guna mengatur lalu lintas manusia antar negara, sebagai perwujudan atas penghormatan kedaulatan negara melalui undang-undang keimigrasian serta memberikan sarana prasarana bagi migran yang mengalami penyelundupan selama proses penanganan berlangsung.

Kata kunci : *Tanggungjawab, Negara transit, Penyelundupan manusia, Australia*

ABSTRACT

people smuggling is a form of organized transnational crime. It is ironic to see the fact that it turns out that immigrant smuggling is mostly done through sea lane from the territory of Indonesia to Australia. The purpose of this study was to determine the implications of Indonesia as a transit country and a form of responsibility of the Indonesian government in overcoming people smuggling to Australia. This study used normative juridical method namely by emphasizing document review legal documents and library materials. Collected data was compiled, explained then analyzed qualitatively, concluded according to the principal these problems, and presented systematically. Research result show that the implications endanger the basic values that have been maintained and in accordance with the basic values of the Indonesian state that can affect state relations politically, in this case the three related political relations are Indonesia as a transit country, Australia as a destination country for migrants, and the country of origin and competition in business then it can be debilitating for Indonesian businesses because foreigners are smuggled as laborers it is certainly cheaper and the Indonesian government is responsible for protecting its citizens as a manifestation of aspects of loyalty and protection. Implementation of the law relationships are the one of legal existence regulations to regulate human traffic between country, as a manifestation of respect for state sovereignty through law immigration and providing infrastructure for migrants who experience smuggling during the handling process.

Keywords: Responsibility, transit country, people smuggling, Australia